

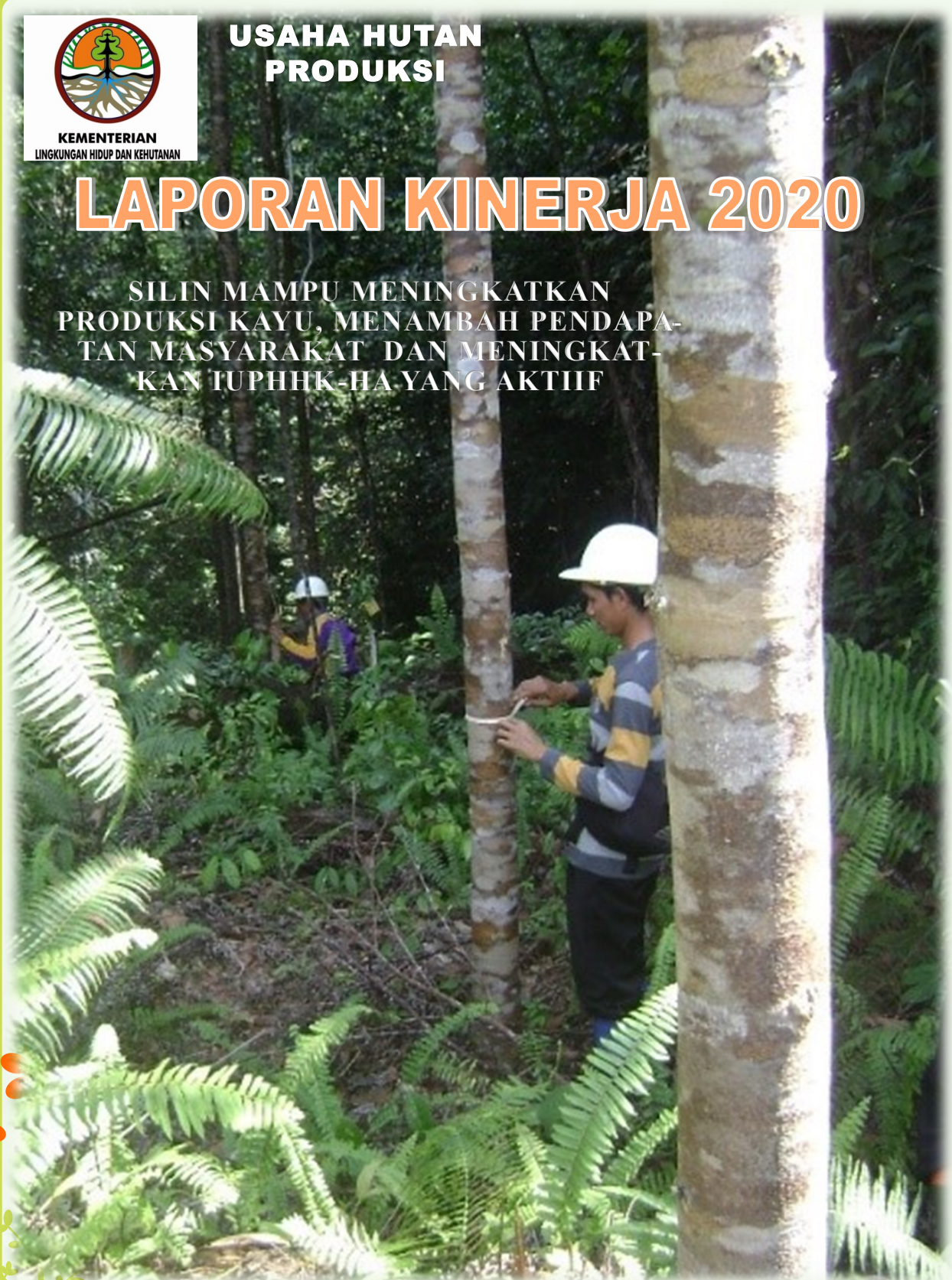


KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

USAHA HUTAN PRODUKSI

LAPORAN KINERJA 2020

SILIN MAMPU MENINGKATKAN
PRODUKSI KAYU, MENAMBAH PENDAPA-
TAN MASYARAKAT DAN MENINGKAT-
KAN TUPHHK-HA YANG AKTIIF



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dari Rencana dan Realisasi kegiatan Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberi gambaran/informasi dan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi serta mengidentifikasi hambatan/permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih banyak yang perlu disempurnakan baik dari sisi redaksional, isi/bobot data yang ditampilkan maupun solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, sumbang saran dan pemikiran serta kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini disampaikan ucapan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkompeten dan dapat dijadikan bahan serta acuan dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi.

Jakarta, Januari 2021

Direktur,



Ir. Istanto, M.Sc.

NIP 19621119 199003 1 001



DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	5
E. Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Renstra Direktorat Usaha Hutan Produksi 2020 – 2024	7
B. Rencana Kerja Tahun 2020	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
D. Pengukuran Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	11
a. Jumlah IUPHHK yang Aktif	11
b. IUPHHK-HA dan HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik	12
c. Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Hutan Produksi	13
d. Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi	17
e. Produksi Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	17
f. Luas Areal Budidaya yang Dikelola Bermitra dengan Masyarakat	19
2. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Renstra 2020 2024	21
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran dan Usulan Tindak Lanjut	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	5
Gambar 2. Grafik Jumlah IUPHHK yang Aktif	12
Gambar 3. Grafik IUPHHK-HA dan HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik	13
Gambar 4. Grafik Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Hutan Produksi Tahun 2020	14
Gambar 5. Pengukuran Diameter Tanaman SILIN PT SBK	15
Gambar 6. Areal Penanaman SILIN PT Sarpatim	15
Gambar 7. Rapat Pembahasan Evaluasi Penerapan SILIN Tahun 2020	16
Gambar 8. Bibit Meranti Hasil Cabutan Alam Di PT Balikpapan Wana Lestari.....	16
Gambar 9. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana SILIN	16
Gambar 10. Grafik Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi .	17
Gambar 11. Grafik Produksi Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	18
Gambar 12. Grafik Luas Areal Budidaya yang Dikelola Bermitra dengan Masyarakat	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kerja Direktorat Usaha Hutan Produksi	
Tahun 2020	9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi	
Tahun 2020	10
Tabel 3. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	11
Tabel 4. Data Realisasi Penanaman	14
Tabel 5. Data Realisasi Produksi	18
Tabel 6. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja	
Tahun 2020 – 2024 dengan Renstra	21
Tabel 7. Realisasi Anggaran Tahun 2020 per Jenis Kegiatan	22

BAB I PENDAHULUAN

DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan bahwa Direktorat Usaha Hutan Produksi adalah Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Direktorat Usaha Hutan Produksi adalah melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan tanaman dan hutan alam serta penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Usaha Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi; dan
5. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Sedangkan tugas dan fungsi dari masing-masing sub direktorat dan sub bagian lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi adalah sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang

rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan; dan
- bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan.

Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam terdiri atas :

- Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam Wilayah I;
- Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam Wilayah II.

2. Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Hutan Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan;
- penyiapan bahan pelaksanaan di bidang rencana kerja hasil hutan dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan; dan
- bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan.

Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman terdiri atas:

- Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman Wilayah I;
- Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman Wilayah II.

3. Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam; dan
- penyiapan bahan pemberian teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam; dan
- penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan alam.

Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam terdiri atas :

- Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam Wilayah I;
- Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam Wilayah II.

4. Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman

Subdit Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman terdiri dari :

- Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I;
- Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II.

5. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan.

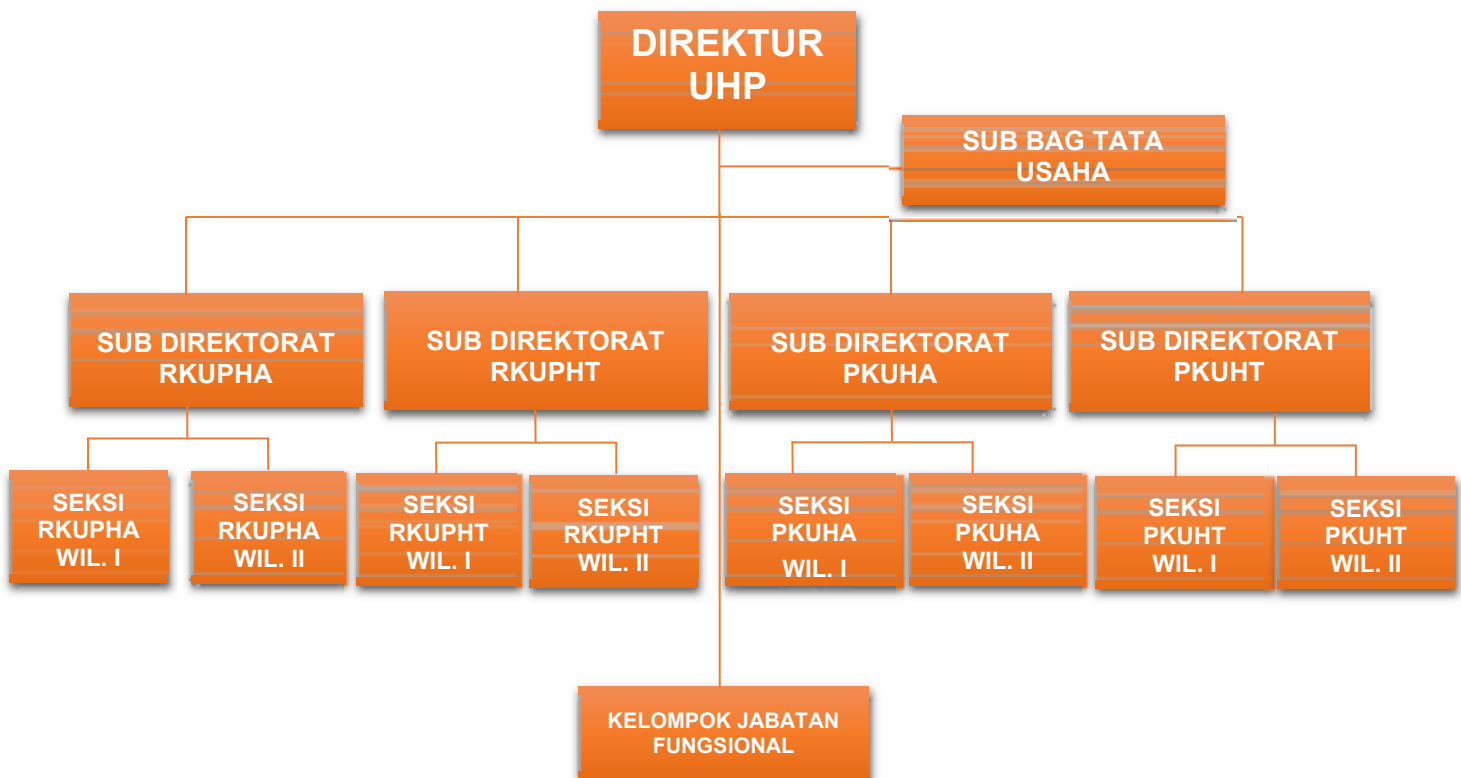
Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam.

C. Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi pada Direktorat Usaha Hutan Produksi dilaksanakan oleh 4 (empat) Eselon III/Sub Direktorat dan 1 (satu) Eselon IV/Sub Bagian yaitu:

- a. Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam;
- b. Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman;
- c. Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam;
- d. Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman;
- e. Sub Bagian Tata Usaha

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI



Gambar 1. Struktur Organisasi

D. Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terdapat beberapa permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang terdiri dari aspek ekonomi/produksi, sosial dan lingkungan.

1. Aspek Ekonomi/Produksi
 - a. Rendahnya produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA/HT
 - b. Meningkatnya degradasi lahan hutan produksi
 - c. Terdapat IUPHHK-HA/HT yang tidak beroperasi
2. Aspek Sosial
 - a. Konflik tenurial
 - b. Masyarakat sekitar hutan belum sejahtera
 - c. Konflik kepentingan
3. Aspek Lingkungan
 - a. Kebakaran hutan dan lahan
 - b. Tata kelola ekosistem gambut

c. Teknik pemanenan yang belum ramah lingkungan

Tantangan pengelolaan hutan produksi yang dihadapi tersebut perlu ditangani melalui kegiatan Direktorat Usaha Hutan Produksi dengan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.

E. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*)

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar : Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Direktorat Usaha Hutan Produksi 2020 -2024

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Direktorat UHP 2020-2024 yaitu meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman dan seluruh usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman aktif beroperasi pada Tahun 2020, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun adalah :

1. Jumlah unit IUPHHK-HA dan HT yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 439 unit;
2. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 1.972.000 ha;
3. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 15.000 ha;
4. Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 269 juta m³;
5. Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 65.000 ha;
6. IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 385 unit manajemen;

Strategi pencapaian sasaran strategis Direktorat UHP 2020 – 2020 :

1. Peningkatan produktivitas hutan melalui Teknik SILIN;
2. Peningkatan areal non produktif dengan penerapan Multisistem Silvikultur;
3. Membantu pemerintah daerah dengan memberikan banyak informasi perkembangan dan pengembangan investasi di sektor kehutanan serta fasilitasi kerja sama pemerintah-swasta;
4. Membiasakan kerja secara jejaring yang mengutamakan komunikasi dan koordinasi baik secara *online* ataupun *offline* dengan bagan kerja yang solutif;
5. Kerja sama swasta dan masyarakat sekitar hutan melalui pola-pola kemitraan dalam menciptakan permintaan internal produk pangan, HHBK dan mendesain pola ruang sesuai tipologi lingkungan serta kondisi tapak;
6. Rasionalisasi, standarisasi dan sinkronisasi peraturan harus menjadi bagian dari reformasi birokrasi;
7. Pembentukan *integrated forest based cluster* dan turunannya (HTI bioenergi, HTI Rayon, HTI pulp dan kertas) dan penerapan agroforestri di HTI merupakan bagian dari membangun citra HTI lebih positif;
8. Sistem informasi interkoneksi antar dan internal direktorat di tingkat pusat dan lapangan/UPTD;
9. Solusi kombinasi peraturan, bisnis dan teknis untuk HTI non industri;

10. Mengembangkan modal sosial melalui peningkatan lima dimensi : citra, kecepatan, hubungan dan akses bagi masyarakat;
11. Pemetaan kondisi ekosistem hutan di dalam kawasan hutan produksi dengan berbagai alternatif teknik-teknik silvikultur;
12. Mendayagunakan fungsi litbang kehutanan dalam proses adopsi teknologi dan model kelembagaan pemanfaatan lahan yang optimal; upaya mitigasi risiko pembangunan hutan tanaman; pemilihan spesies unggulan untuk industri dan energi;
13. Memperbaiki tata kelola dan kelembagaan yang berdaya saing, termasuk menanggulangi praktik pungutan tidak resmi di bidang kehutanan;
14. Membangun iklim industrial yang kondusif di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing industri kehutanan dan mendorong terbentuknya mekanisme pasar kayu bulat domestik.

B. Rencana Kerja Tahun 2020

IKP Direktorat Jenderal PHPL yang menjadi tanggung jawab Direktorat UHP adalah sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun, maka untuk mendukung IKP tersebut ditetapkan kegiatan Direktorat UHP 2020-2024 yaitu kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen Kegiatan
Meningkatnya Produktifitas Hutan Alam dan Hutan Tanaman	IUPHHK HA & HT yang aktif (Unit)	360 unit	1. Penyusunan dan Penguatan NSPK 2. Evaluasi Administrasi 3. Evaluasi Lapangan 4. Evaluasi Karhutla pada IUPHHK 5. Pengembangan SI Kinerja IUPHHK 6. Pembinaan dan Pengendalian UM
	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (Ha)	125.000 ha	1. Penyusunan NSPK Sistem Silvikultur 2. Penerapan SILIN pada Hutan Alam 3. Pembinaan dan Pengendalian Penanaman/Pengkayaan 4. Pembinaan dan Pengendalian Penanaman HTR
	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	1.000 ha	1. Percepatan pengembangan Hutan Tanaman Energi 2. Fasilitasi Pembangunan HTE

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen Kegiatan
	(Ha)		
Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dari hutan alam dan hutan tanaman	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (m3)	30 juta m3	1. Penyusunan dan Penguatan NSPK 2. Penilaian dan Persetujuan RKU 3. Pendampingan Penerapan RIL 4. Pengembangan Multiusaha dan Ketahanan Pangan 5. Penguatan dan Analisis Data dan Informasi Pemanfaatan Hasil Hutan 6. Analisis Kawasan Hidrolisis Gambut pada IUPHHK 7. Evaluasi Implementasi RKU 8. Pembinaan dan pengendalian 9. Analisis data dan spasial
Meningkatnya hak akses masyarakat pada kawasan hutan produksi	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (ha).	10.000 ha	1. Analisis Kelola Sosial 2. Fasilitasi Penyelesaian Konflik di IUPHHK 3. Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan dan Resolusi Konflik 4. Fasilitasi Kemitraan di IUPHHK
Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik (unit manajemen).	267 unit	1. Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja PHPL 2. Pembinaan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL 3. Peningkatan Kapasitas Penilaian Kinerja PHPL

Tabel 1. Rencana Kerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Direktur Usaha Hutan Produksi dan Direktur Jenderal PHPL sebagai upaya untuk :

1. meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan Kinerja Aparatur
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

Penetapan perjanjian kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2018 disajikan dalam Tabel 2.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kinerja dan Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Jumlah IUPHHK yang aktif	360 Rekomendasi
	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	267 Unit Manajemen
	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	125.000 ha
	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	1.000 ha
	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	30 juta m ³
	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	10.000 ha

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020

D. Pengukuran Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi

Pengukuran kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja.

Untuk pemantauan dan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Usaha Hutan Produksi 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020 – 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Target dan realisasi kinerja tahun 2020 disajikan dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kinerja dan Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Jumlah IUPHHK yang aktif	360 Rekomendasi
	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	267 Unit Manajemen
	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	125.000 ha
	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	1.000 ha
	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	30 juta m3
	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	10.000 ha

Pagu anggaran Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 adalah sejumlah Rp4.140.311.000,00 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp4.090.875.233,00 atau 98,81%.

Analisis tercapai atau tidak tercapainya sasaran/indikator kinerja serta faktor penunjang dan faktor penghambat sebagai berikut :

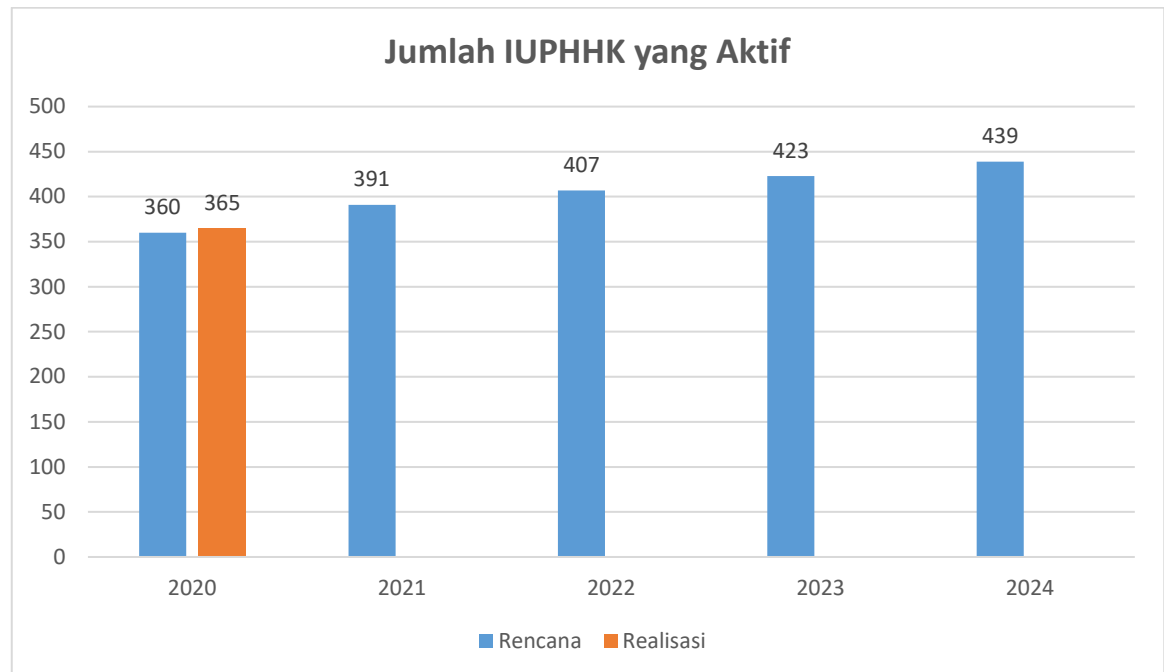
Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kinerja dan Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman

a. Jumlah IUPHHK yang aktif

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 - 2024, jumlah IUPHHK yang aktif sebanyak 439 unit

selama 5 tahun dengan target Rencana Kerja Tahun 2020 ditetapkan sebesar 360 unit. Realisasi jumlah IUPHHK yang aktif tahun 2020 sebanyak 365 unit atau sebesar 101,38%.

Data jumlah IUPHHK yang aktif untuk tahun 2020 disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2. Grafik Jumlah IUPHHK yang Aktif

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja produksi kayu bulat hutan alam yaitu:

- 1) Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) antara lain terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
- 2) Evaluasi implementasi RKUPHHK-HA;
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Produksi kayu bulat hutan alam pada hutan produksi;
- 4) Inisiasi dan sosialisasi teknik *Reduce Impact Logging* (RIL) dalam rangka meningkatkan produktifitas dengan pemanenan ramah lingkungan/berdampak rendah;
- 5) Penanganan konflik sosial pada IUPHHK-HA

b. IUPPHK-HA dan HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik

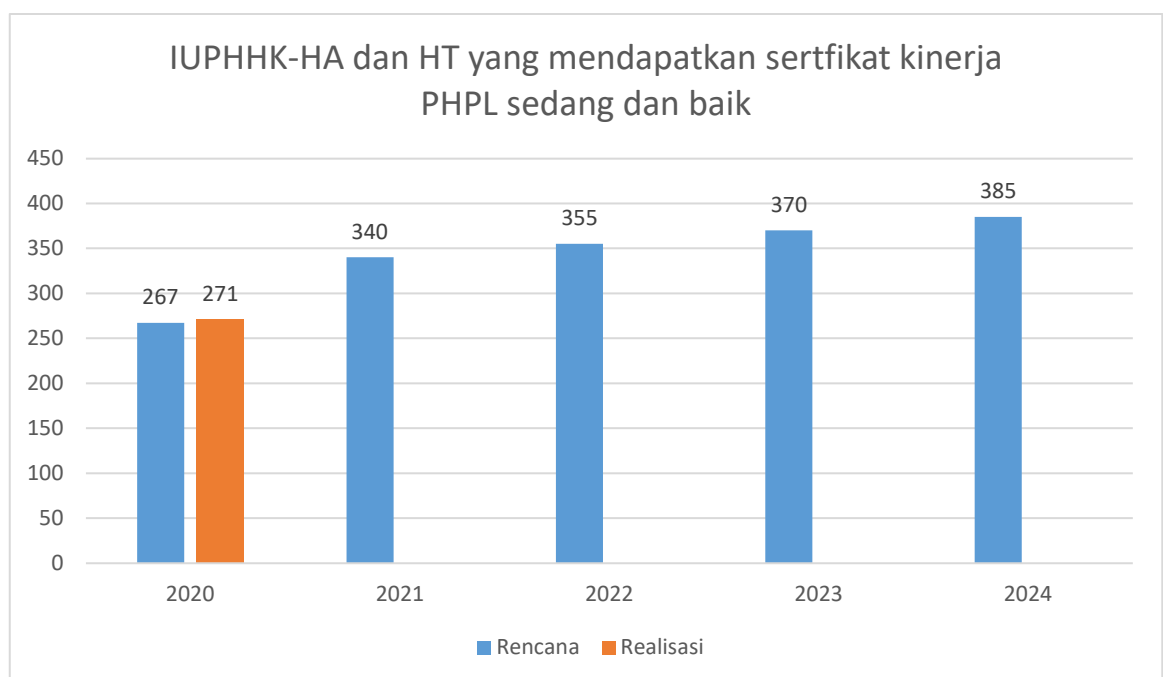
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 - 2024, IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat

kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 385 unit manajemen selama 5 Tahun. Untuk tahun 2020 ditetapkan Rencana Kerja (Renja) IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 267 unit manajemen. Realisasi IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik tahun 2020 sebanyak 271 unit manajemen atau 101,5%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja produksi kayu bulat hutan tanaman yaitu :

- 1) Jumlah unit manajemen yang meningkat kinerjanya pada periode tahun 2015 – 2017 sebanyak 61 unit manajemen;
- 2) Jumlah unit manajemen HT yang telah memiliki kontrak suplai bahan baku industri meningkat;
- 3) Pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang IUPHHK-HT terkait produksi kayu bulat hutan tanaman.

Data IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan Baik tahun 2020 disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 3. Grafik IUPHHK-HA dan HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik

c. Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Hutan Produksi

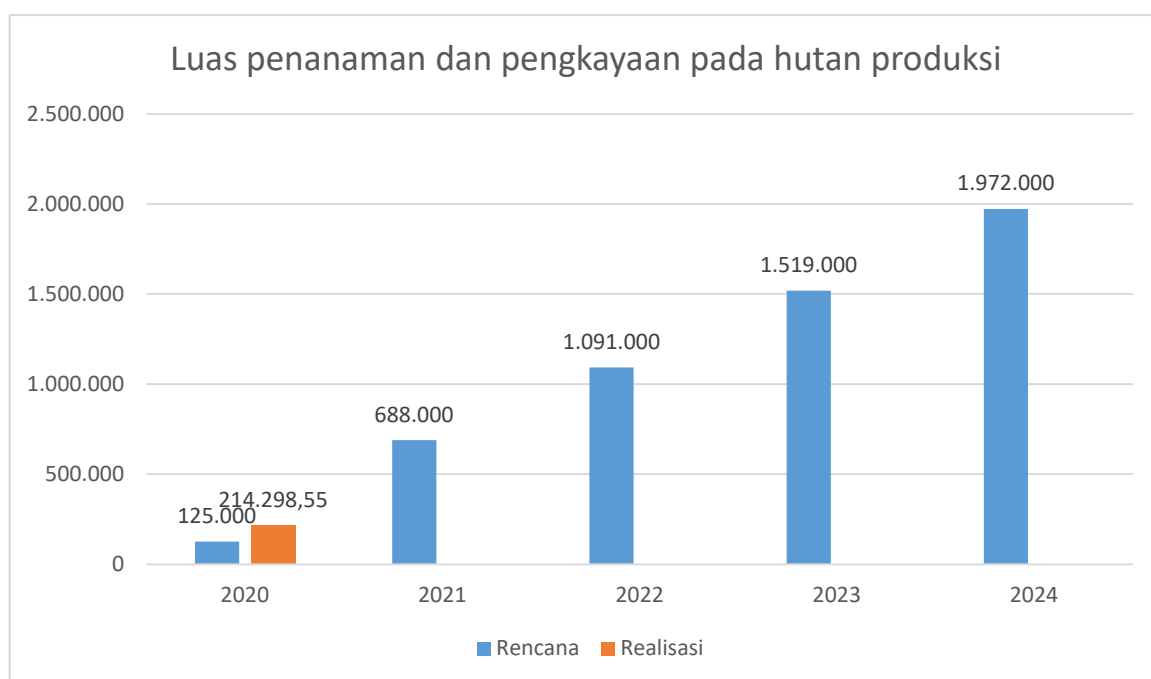
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024, target Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 1.972.000 ha dengan Target Rencana

Kerja tahun 2020 ditetapkan seluas 125.000 ha. Realisasi Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 214.298,55 ha atau sebesar 171,44%. Secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Penanaman	Realisasi (ha)
1	Penanaman Hutan Tanaman	292.029,49
2	Pembinaan Hutan Alam	
	a. Pengayaan TPTI	6.118
	b. Penanaman Kanan Kiri Jalan	995
	c. Penanaman Tanah Kosong	1.044
	d. Penanaman Teknik SILIN	4.134
	e. Penanaman THPB	3.203
Jumlah		307.524,26

Tabel 4. Data Realisasi Penanaman

Data Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi tahun 2020 disajikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4. Grafik Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi tahun 2020

Penanaman dan Pengkayaan pada hutan alam terdiri dari Pengayaan TPTI, Penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan Kayu, Penanaman Tanah Kosong, Penanaman Teknik SILIN, dan Penanaman THPB. Penanaman Teknik Silvikultur (SILIN) Tahun 2020 merupakan salah satu yang mendapat perhatian. Sejak tahun 2018 telah dibentuk Tim Pakar SILIN yang terdiri dari akademisi dan praktisi kehutanan demi mendukung penerapan SILIN pada seluruh IUPHHK-HA dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hutan alam yang mana saat ini berada pada kondisi yang terus menurun produktifitasnya. Sampai dengan tahun 2020, pelaksana SILIN terus bertambah yang semula 18 IUPHHK-HA menjadi 78 unit dan akan terus bertambah sampai dengan seluruh IUPHHK-HA merencanakan SILIN pada dokumen Rencana Kerja Usaha-nya. Beberapa kegiatan untuk mendukung penerapan SILIN yaitu pendampingan penerapan SILIN di lapangan oleh Pakar, Evaluasi Penanaman SILIN, dan Peningkatan SDM.



Gambar 5. Pengukuran diameter tanaman SILIN PT SBK



Gambar 6. Areal penanaman SILIN PT Sarpatim



Gambar 7. Rapat Pembahasan Evaluasi Penerapan SILIN Tahun 2020



Gambar 8. Bibit Meranti Merah hasil cabutan alam di PT Balikpapan Wana Lestari



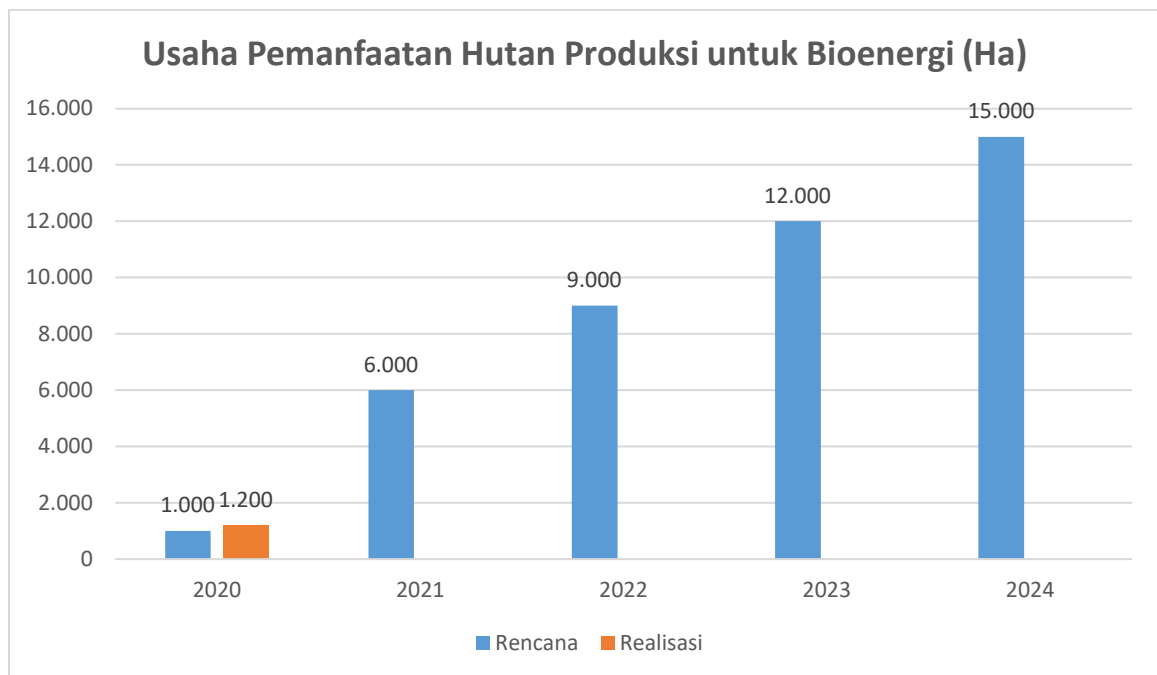
Gambar 9. Peningkatan kapasitas SDM Pelaksana SILIN

d. Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 - 2024, Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 15.000 ha dengan target Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 ditetapkan seluas 1.000 ha. Realisasi luas pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi tahun 2020 seluas 1.200 ha atau 120%.

Realisasi tersebut berasal dari 13 Pemegang IUPHHK-HT yang sudah mengalokasikan arealnya untuk tanaman bioenergi dari 32 IUPHHK-HT dan Perum Perhutani yang telah berkomitmen untuk bioenergi dan mengembangkan hutan bioenergi.

Data realisasi luas pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi tahun 2020 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 10. Grafik Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi

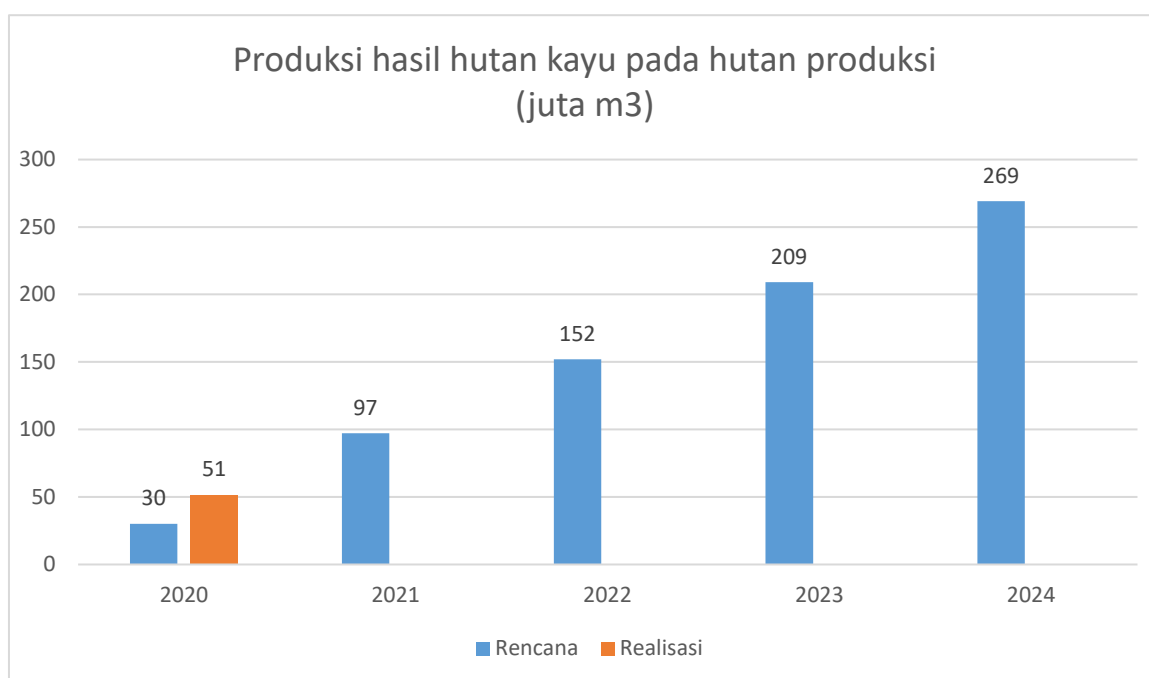
e. Produksi Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 - 2024, Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 269 juta m³ dengan target Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 ditetapkan sebesar 30 juta m³. Realisasi Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 51,304 juta m³ atau 171,01%. Secara rinci produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Jenis Izin	Realisasi Produksi (m ³)
IUPHHK-HT	45.115.302,39
IUPHHK-HA	5.272.099,83
IPK/IPPKH	916.915,43
Jumlah	51.304.317,65

Tabel 5. Data Realisasi Produksi

Data Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi tahun 2020 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 11. Grafik Produksi Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi

Direktorat Jenderal PHPL terus mendorong peningkatan kinerja produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA tahun 2020 di masa pandemi dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu Monitoring produksi, Webinar Nasional dan Meeting secara daring bersama-sama dengan Pemegang IUPHHK-HA dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Beberapa strategi Direktorat jenderal PHPL untuk meningkatkan produktifitas hutan alam dan pengelolaan hutan lestari secara keseluruhan yaitu:

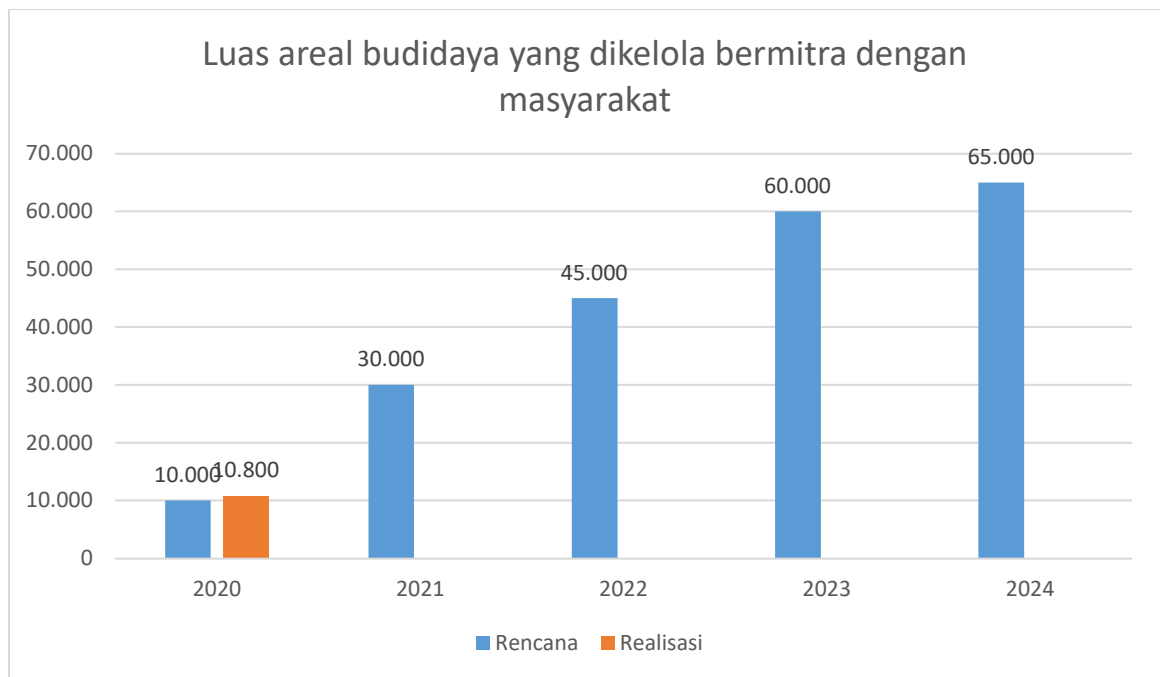
- 1) Implementasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja Kelola usahanya dengan memberikan peluang kerja sama investasi dalam pemanfaatan hutan bersama stakeholders.

- 2) Menjamin pemenuhan bahan baku dari perizinan berusaha yang melaksanakan multiusaha untuk mendukung daya saing industri pengolahan kayu dan industri lainnya (industri berbasis serat : pulp paper dan rayon, industri panel kayu, industri lanjutan serta industri bioenergi, pangan, pakan, dan obat-obatan).
- 3) Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk.
- 4) Memberikan fasilitasi dan dukungan permodalan bagi perizinan berusaha melalui pola pengelolaan keuangan
- 5) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (pengganti BLU Kehutanan).
- 6) Menjamin keberlangsungan usaha dengan pemberian jangka waktu perizinan berusaha yang panjang, pemberian insentif pengenaan DR hanya untuk kayu hutan alam (tumbuh alami), bukan lagi berdasarkan izin. Menerapkan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan sesuai kondisi tapak (multi sistem silvikultur, Teknik SILIN).
- 7) Memberikan fasilitasi pemegang perizinan berusaha untuk membangun industri pengolahan hasil hutan di areal kerjanya.
- 8) Mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran masyarakat dan UKM (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial-KUPS).

f. Luas Areal Budidaya yang dikelola bermitra dengan Masyarakat

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 - 2024, luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 65.000 ha dengan target Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 ditetapkan seluas 10.000 ha. Realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 10.800 ha atau 108%.

Data realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat tahun 2020 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 12. Grafik Luas Areal Budidaya Yang Dikelola Bermitra Dengan Masyarakat

2. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan Renstra 2020 - 2024

Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tanggal 7 September 2020, tersaji pada Tabel 4 berikut ini.

No	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024			Total Realisasi s.d 2020	Renstra (2020 – 2024)	%
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
a	Jumlah IUPHHK yang aktif	360	365	101,38	391	-	-	407	-	-	423	-	-	439	-	-	365	439	83,14
b	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	267	271	101,5	340	-	-	355	-	-	370	-	-	385	-	-	271	385	70,39
c	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	125.000	214.298,55	171,44	688.000	-	-	1.091.000	-	-	1.519.000	-	-	1.972.000	-	-	214.298,55	1.972.000	10,87
d	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	1.000	1.200	120	6.000	-	-	9.000	-	-	12.000	-	-	15.000	-	-	1.200	15.000	8
e	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	30 juta m3	51,304 juta m3	171,01	97 juta m3	-	-	152 juta m3	-	-	209 juta m3	-	-	269 juta m3	-	-	51,304 juta m3	269 juta m3	19,07
f	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	10.000	10.800	108	30.000	-	-	45.000	-	-	60.000	-	-	65.000	-	-	10.800	65.000	16,62

Tabel 6. Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2020-2024 dengan Renstra

Penjelasan dari tabel tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah IUPHHK yang Aktif
- b. IUPHHK-HA dan HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik
- c. Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Hutan Produksi
- d. Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi
- e. Produksi Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
- f. Luas Areal Budidaya yang Dikelola Bermitra dengan Masyarakat

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 sebesar Rp4.140.311.000,00. Realisasi anggaran berdasarkan sumber data <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> dari Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp4.090.875.233,00 (98,81%).

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan disajikan pada tabel berikut.

No	Kegiatan	Pagu (Rupiah)	Realisasi	%
1	Jumlah IUPHHK yang aktif	1.013.779.000	831.445.733	82,01
2	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	540.081.000	1.654.829.741	306,40
3	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	1.394.304.000	1.023.329.172	73,39
4	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	73.608.000	72.771.500	98,86
5	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	451.516.000	359.548.087	79,63
6	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	667.023.000	148.941.000	22,33
	Jumlah	4.140.311.000	4.090.875.233	98,81

Tabel 7. Realisasi anggaran tahun 2020 per jenis kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sasaran dan capaian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 98,81% dengan rincian setiap sasaran/indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Target Jumlah IUPHHK yang aktif Tahun 2020 ditetapkan sebesar 360 unit dengan realisasi sebanyak 365 unit atau sebesar 101,38%.
 - b. Target IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 267 unit manajemen. Realisasi IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik tahun 2020 sebanyak 271 unit manajemen atau 101,5%.
 - c. Target target Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi tahun 2020 seluas 125.000 ha dengan realisasi luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 214.298,55 ha atau sebesar 171,44%.
 - d. Target Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi tahun 2020 ditetapkan seluas 1.000 ha dengan realisasi luas pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi tahun 2020 seluas 1.200 ha atau 120%.
 - e. Target Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi tahun 2020 ditetapkan sebesar 30 juta m³ dengan realisasi produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 51,304 juta m³ atau 171,01%.
 - f. Target luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat tahun 2020 ditetapkan seluas 10.000 ha dengan realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 10.800 ha atau 108%.
2. Capaian output sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra 2020 – 2024.
 - a. Target Jumlah IUPHHK yang aktif Tahun 2020 ditetapkan sebesar 439 unit dengan realisasi sebanyak 365 unit atau sebesar 83,14%.
 - b. Target IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 385 unit manajemen dengan realisasi IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik tahun 2020 sebanyak 271 unit manajemen atau 70,39%.
 - c. Target target Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi tahun 2020 seluas 1.972.000 ha dengan realisasi luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 214.298,55 ha atau sebesar 10,87%.
 - d. Target Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi tahun 2020

ditetapkan seluas 15.000 ha dengan realisasi luas pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi tahun 2020 seluas 1.200 ha atau 8%.

- e. Target Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi tahun 2020 ditetapkan sebesar 269 juta m³ dengan realisasi produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 51,304 juta m³ atau 19,07%.
 - f. Target luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat tahun 2020 ditetapkan seluas 65.000 ha dengan realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 10.800 ha atau 16,62%.
3. Pagu anggaran Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 adalah sejumlah Rp 4.140.311.000,00 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp 4.090.875.233,00 atau 98,81%

B. Saran dan Usulan Tindak Lanjut

Capaian kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020, dengan serapan anggaran sebesar 98,81 % harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan juga menghasilkan outcome yang baik sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Memasuki tahun 2021 untuk target produksi hasil hutan kayu perlu ditingkatkan lagi khususnya dengan mengembangkan pola tanam SILIN yang tidak hanya terbatas di Provinsi Kalimantan saja, tetapi bisa dikembangkan diseluruh Nusantara.